

**IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PADAT KARYA DALAM RANGKA  
MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN KECAMATAN WONOCOLO KOTA  
SURABAYA PERIODE 2022-2023**

Amara Nilla Maharima<sup>1</sup>, Supratiwi<sup>2</sup>, Yuwanto<sup>3</sup>

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*The Rumah Padat Karya Program is one of the programs approved by the Surabaya City Government as a form of effort to deal with the increase in poverty and unemployment rates due to the impact of Covid-19. Wonocolo is one of the sub-districts that has a labor intensive house with several businesses in it. The implementation of Rumah Padat Karya Program encourages research to obtain adequate information related to the implementation of the Rumah Padat Karya Program. The aim of this research is to analyze the implementation of the Rumah Padat Karya Program in Kecamatan Wonocolo, Surabaya City, as a poverty alleviation program and reduce unemployment rates and to analyze the driving and inhibiting factors of program implementation. In this research, the analysis related to program implementation uses an implementation theory approach with four factors as conditions for the success of program implementation. This research uses descriptive qualitative research methods as a tool in solving the problems raised, using interview techniques, observation and literature study. The research results show that the implementation of the Rumah Padat Karya program in Wonocolo District has gone quite well, assessed by the four factors of implementation going well.*

**Keywords:** *Implementation, Rumah Padat Karya*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Program Rumah Padat Karya adalah salah satu program baru yang diresmikan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai bentuk upaya dalam mengurangi jumlah kemiskinan di kota Surabaya. Meningkatnya angka kemiskinan dan juga pengangguran akibat pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Kota Surabaya mendorong pemerintah untuk segera menangani hal tersebut. Dampak yang diberikan oleh Covid-19 tentu dalam bidang ekonomi dan sosial. Dimana, sektor ekonomi mengalami kemerosotan sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan juga pengangguran. Berdasarkan dengan data tercantum pada Badan Pusat Statistika yang ada, jumlah dari masyarakat miskin adalah:

**Tabel 1.1 Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin**

Tahun	Persentase Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin
2018	4,88%	140.810
2019	4,51%	130.550
2020	5,02%	145.670
2021	5,23%	152.489
2022	4,72%	138.210

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota

Surabaya 2020

Dan pada tahun 2023, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistika Kota Surabaya jumlah masyarakat miskin turun menjadi 136.370 ribu jiwa. Di mana, dapat dikatakan kembali mengalami penurunan sejak tahun 2022.

Pandemi *Covid-19* yang berlangsung dalam 2 tahun lamanya hingga saat ini, terdapat fakta di dalamnya bahwa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya entah itu karena bangkrut atau PHK yang dipilih oleh perusahaan akibat adanya krisis menjadi salah satu dampaknya. Hal tersebut menimbulkan adanya peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan di Indonesia. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik Kota Surabaya tingkat masyarakat pengangguran dari tahun 2018-2022 adalah:

**Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Jumlah Pengangguran Terbuka
2018	6,01%	92.914
2019	5,76%	91.557
2020	9,79%	154.896
2021	9,68%	152.200
2022	7,62%	114.300

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota  
Surabaya 2021

Sedangkan, untuk tahun 2023 angka pengangguran di Kota Surabaya juga mengalami penurunan sebesar 0,9% dari tahun 2022. Sehingga, tercatat dalam Badan Pusat Statistika bahwa angka pengangguran di Kota Surabaya mencapai 6,76%.

Dalam hal ini, Program Rumah Padat Karya merupakan salah satu usaha yang dikerahkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kota Surabaya. selaras dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya. Dimana, padat karya merupakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat kepada keluarga miskin yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Rumah Padat Karya telah menghasilkan banyak program seperti adanya pelatihan, pemasaran produk, hingga pemberian bantuan modal untuk memberdayakan UMKM yang ada di Kota Surabaya. Program-program yang telah dijalankan tersebut berisikan para anggota MBR (Masyarakat Berpenghasilan

Rendah) untuk dapat mendapatkan penghasilan yang lebih memadai. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan masyarakat dengan penghasilan rendah dan memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat bantuan dari pemerintah. Para MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) diberikan pelatihan serta diberikan fasilitas berupa alat dan bahan, lalu ditingkatkan dan diberdayakan yang nantinya akan disediakan pasarnya untuk mengembangkan usaha yang telah dilakukan saat pelatihan. Tidak hanya itu, banyaknya lahan yang terbengkalai atau tidak terpakai diubah oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk dijadikan tempat usaha para MBR yang harus dikembangkan dan dikelola. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Program Rumah Padat Karya telah diresmikan pada tanggal 25 Maret 2022 oleh Walikota Surabaya. Dilansir dari [www.tempo.co](http://www.tempo.co) terdapat ratusan MBR yang telah terserap melalui program ini. Banyak pula tempat yang merupakan aset kota yang terbengkalai diubah menjadi tempat usaha bagi masyarakat, entah itu dalam bentuk café, tempat laundry, tempat cuci mobil dan motor, tempat menjahit, pertanian, padi, peternakan ayam pedaging, budidaya lele dan nila, tempat

potong rambut, dan masih banyak lagi. Bahkan dari hasil program tersebut telah menghasilkan ratusan hingga jutaan rupiah setiap bulannya, yang tentunya sangat membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

Setelah berjalan beberapa bulan usai diresmikan, telah banyak MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) terserap dalam program padat karya ini. Hingga pada bulan Juni tercatat terdapat ratusan dari masyarakat yang telah berhasil terserap dan menghasilkan penghasilan dari ratusan hingga jutaan rupiah (Liputan6.com, 2022). Penghasilan tersebut berasal dari berbagai macam usaha atau UMKM yang telah dijalankan selama beberapa bulan setelah disahkannya Program Padat Karya ini. Sehingga, untuk ukuran awal berjalannya suatu program dapat dikatakan sebagai awal yang baik.

Wonocolo merupakan salah satu kecamatan yang telah memiliki rumah padat karya, bahkan rumah padat karya di kecamatan wonocolo telah memiliki nama sebutannya sendiri yakni Rumah Glowing yang merupakan singkatan dari Galeri Halaman Wonocolo Connecting, yang berarti sentra potensi yang ada di wilayah wonocolo. Dengan beberapa usaha yang ditawarkan seperti cuci kendaraan bermotor, Servis AC, jahit bordir dan *cutting sticker*. Sebelum masyarakat

masuk kedalam usaha tersebut, pemerintah pusat memerintahkan perangkat daerah untuk melakukan survey terhadap masyarakat miskin yang ingin ikut andil dalam program tersebut. Dilansir dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) yang ada Rumah Glowing di Kecamatan Wonocolo telah menyerap sebanyak 32 jiwa meliputi 10 MBR di bidang jasa Servis, 10 MBR di bidang konveksi jahit dan border, 4 MBR untuk cutting sticker dan juga 8 MBR dalam bidang cuci motor dan mobil (kompas.com, 2022).

Penelitian ini sendiri didasarkan pada identifikasi Implementasi Program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya sebagai salah satu program pengentas kemiskinan dan pengangguran, bagaimana implementasi dari program Rumah Padat Karya sudah berjalan dengan baik atau justru terbengkalai hingga akhirnya tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita Walikota Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengurangi jumlah MBR di kota Surabaya sebanyak 300 ribu akhir tahun 2022. Hal inilah yang membuat penulis merasa terdorong untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana implementasi Rumah Padat Karya di kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, bagaimana perkembangan program Rumah Padat Karya selama satu tahun diterapkannya,

serta bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada nama program yang telah diresmikan, yakni Program Rumah Padat Karya yang ada di Kota Surabaya, bentuk dari program itu sendiri. Dimana Program Rumah Padat Karya ini merupakan program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lalu diserap kedalam UMKM yang telah didanai oleh pemerintah kota Surabaya. UMKM tersebut dapat dikatakan sebagai lapangan kerja yang didalamnya menyerap masyarakat yang menganggur ataupun masyarakat yang berpenghasilan rendah. Program rumah padat karya ini merupakan program baru yang mana dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru. Mengingat program ini masih beberapa bulan diresmikan. Fokus dari penelitian ini sendiri adalah mengetahui implementasi Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sebagai program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi dari Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo Kota

Surabaya dalam rangka mengurangi kemiskinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sebagai program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Implementasi tersebut mencakup beberapa hal yakni mengetahui perkembangan pelaksanaan program rumah padat karya selama satu tahun diterapkan di masyarakat Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, serta manfaat apa saja yang telah diberikan semenjak diresmikannya program tersebut bagi masyarakat.

## **D. Kerangka Teori**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan dengan aktivitas untuk menyelesaikan atau melaksanakan kebijakan yang telah diresmikan/ditetapkan/disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Tachjan, 2006). Menurut Tachjan (2006), implementasi kebijakan dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai birokrasi dalam proses kebijakan

publik. Implementasi kebijakan sendiri memiliki kedudukan yang cukup penting dalam proses kebijakan, sehingga implementasi kebijakan haruslah mendapatkan perhatian.

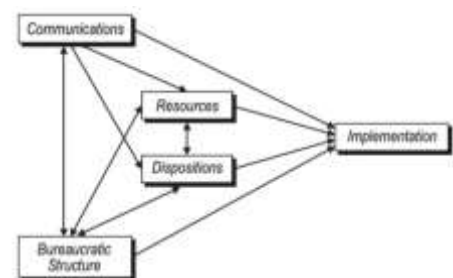
Dalam implementasi kebijakan memerlukan adanya tenaga kerja, uang, serta kemampuan organisasi. Implementasi kebijakan sendiri dapat dilihat dari beberapa pandangan atau perspektif atau pendekatan. Salah satu perspektif tersebut datang dari Edward III (1980: 9-10), dimana Edward III mengajukan adanya pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni a.) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? b.) Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Menurut teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Edward III (1980:1) merupakan sebuah proses yang sangat krusial, sebab seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak ada persiapan dan rencana yang baik dalam implementasinya maka apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan terwujud. Sebaliknya, jika persiapan serta perencanaannya berjalan dengan baik, tetapi kebijakannya tidak dirumuskan dengan maka hasilnya pun sama saja yakni tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Berdasarkan dengan kedua

pernyataan tersebut menurut kerangka pikir dari Edward III (1984) (dalam Tachjan, 2006) dapat dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses dari implementasi yakni:

1. Komunikasi (*communication*),
2. Sumber Daya (*resources*),
3. Disposisi (*Dispositions*) atau Sikap Pelaksana Birokrasi, serta adanya
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

**Gambar 1.2 Faktor-faktor Implementasi Kebijakan**



Gambar 2.5. Direct and Indirect Impact on Implementation

Sumber: George Edwards III, 1980: 148

Sumber: Dr. Tachjan (2006),  
Implementasi Kebijakan

Dengan empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dimana diantara aktor-aktor tersebut terjadi adanya interaksi serta pada gilirannya berpengaruh pada implementasi. Dimana menurut Edward III (dalam Mulyadi, 2015) tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan

dari pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang berasal dari suatu kebijakan yang meliputi usaha atau upaya dalam mengelola input untuk menghasilkan output bagi masyarakat.

Pada kaitannya dengan penelitian ini adalah, implementasi dari program Rumah Padat Karya sebagai salah satu bentuk kebijakan yang diresmikan oleh pemerintah kota Surabaya untuk memecahkan adanya masalah publik di Kota Surabaya yakni kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tachjan (2006) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas untuk menyelesaikan atau melaksanakan kebijakan yang telah diresmikan/ditetapkan/disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga, dalam menentukan pelaksanaan atau implementasi dari sebuah program dibutuhkan adanya faktor seperti yang dikemukakan oleh Edward III. Maka dari itu, dibutuhkan adanya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan juga Struktur Birokrasi dalam menilai pelaksanaan program. Dalam hal ini Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Briokrasi diposisikan sebagai faktor kepemilikan atau hal yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam pelaksanaan program.

Sedangkan, komunikasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai penunjang keberjalanan program. Oleh karena itu, dalam penelitian ini empat faktor tersebut digunakan sebagai penentu pelaksanaan atau implementasi Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dari data yang dihimpun di lapangan dan dianalisis tanpa modifikasi sehingga hasilnya dapat berupa serangkaian kata yang menggambarkan fenomena yang ditemui selama proses penelitian (Sugiyono, 2013:7). Terdapat beberapa narasumber yang telah terpilih menjadi informan penelitian sesuai dengan kriteria dan kebutuhan dari peneliti. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Penanggungjawab Rumah Glowing Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Pendamping Rumah Glowing Kecamatan Wonocolo, pegawai dari setiap UKM yang ada di Rumah Glowing (Setiap UKM perwakilan 1 orang). Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data

penelitian yakni wawancara, observasi, dan juga dokumen/studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Rumah Padat Karya Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.**

#### **1. Jaringan Komunikasi yang Terjalin antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Padat Karya**

Komunikasi merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi suatu program. Sehingga, komunikasi dapat dikatakan suatu unsur yang sangat penting untuk memulai pelaksanaan sebuah program atau kebijakan yang telah direncanakan dan juga disahkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan kepada masyarakat yang merupakan penerima manfaat dari kebijakan yang telah dibuat. Jaringan komunikasi yang baik dan juga efektif dapat menjadi pilar dalam penyampaian program dan tujuan disahkannya program tersebut. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti sosialisasi, dari mulut ke mulut, dan juga melalui media berita.

Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat cukup berjalan dengan baik. Mengingat pemerintah telah berusaha untuk terus mendampingi dan juga membimbing

masyarakat. Adanya sosialisasi dan juga pelatihan yang diberikan oleh pemerintah menjadi pemeran utama pemerintah dalam membangun jaringan komunikasi dengan masyarakat. Sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pengenalan program Rumah Padat Karya Kecamatan Wonocolo telah berjalan dengan baik dan tersampaikan dengan baik. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk persiapan masyarakat memulai usaha telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelatihan yang diberikan disiapkan berdasarkan dengan keinginan masyarakat. Dimana, pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Disnaker, Perguruan tinggi dan juga beberapa perusahaan yang terkait dengan usaha yang akan dilaksanakan. Sehingga, dapat dimaknai bahwa pelatihan yang diberikan oleh pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, pelatihan yang diberikan memiliki peran yang cukup krusial dalam keberhasilan program Rumah Padat Karya. Pelatihan ini tidak hanya memberikan peningkatan keterampilan namun juga pengetahuan,



pengalaman dan juga kemandirian masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan lebih siap dan mampu untuk berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan program Rumah Padat Karya, serta memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang. Pelatihan yang diberikan sebagai salah satu bentuk persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam memulai usaha.

Terkait dengan media komunikasi yang disediakan dan digunakan pun telah tersedia dengan baik. Disisi masyarakat juga menyatakan bahwa hubungan komunikasi yang terjalin dengan pemerintah berjalan dengan baik. Untuk dapat terus menjaga eksistensi program Rumah Padat Karya pemerintah berkala melakukan adanya evaluasi dan monitoring terkait dengan pelaksanaan program. Guna mengetahui keberjalanan program terkait dengan perkembangan dan hambatan yang dialami masyarakat selama pelaksanaan program. Dilihat dari masyarakat diperbolehkan untuk memberikan pendapatnya melalui survey dan pendataan yang dilakukan untuk pelaksanaan program padat karya. Namun, disamping pernyataan bahwa jaringan komunikasi yang terjalin telah berjalan cukup baik, tidak dapat dipungkiri bahwa masih harus

dilakukan adanya peningkatan serta perbaikan untuk dapat menghasilkan implementasi Program Padat Karya yang baik. Peningkatan yang dilakukan mungkin bisa dalam bentuk sosialisasi mendalam terkait dengan program Rumah Padat Karya.

## **2. Kualitas Sumber Daya yang Tersedia untuk Menunjang Pelaksanaan Program Padat Karya**

Dalam suatu implementasi atau pelaksanaan suatu program sumber daya menjadi salah satu aspek keberhasilannya. Dinilai dalam bentuk anggaran atau dana, tenaga kerja atau sumber daya manusia, dan juga infrastruktur dan fasilitas. Jika kualitas dari beberapa aspek tersebut sangatlah memenuhi standar dan juga baik, maka pelaksanaan atau implementasi suatu program akan berjalan dengan baik. Dalam program padat karya yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya, dilakukan adanya perencanaan dan pemanfaatan bangunan kota yang sudah terbengkalai kemudian disulap menjadi salah satu tempat yang memberikan pekerjaan untuk masyarakat miskin dan pengangguran.

Kualitas sumber daya yang disediakan oleh pemerintah baik itu dalam bentuk anggaran/dana, infrastruktur dan juga fasilitas untuk

mendorong keberhasilan program padat karya diusahakan dengan kualitas terbaik. Anggaran dan juga dana yang disalurkan untuk pelaksanaan program berasal dari APBD dan juga Baznas/BSP. Selain itu, adapula dana tambahan berasal dari CSR dari beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah. selain anggaran/dana fasilitas berupa lahan dan juga alat telah tersedia dan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan aset terbengkalai milik kota Surabaya yang diubah menjadi lokasi program padat karya membuktikan bahwa pemerintah serius dalam memaknai Program Rumah Padat Karya dapat berjalan dengan baik.

Dapat dimaknai bahwa dalam hal ini pemerintah telah berusaha secara maksimal dalam menyediakan dan menunjang keberhasilan pelaksanaan program melalui penyediaan lokasi/lahan dan juga fasilitas serta alat dan bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik dari sisi pemerintah dan juga masyarakat memberikan pernyataan yang selaras terkait dengan kualitas ketersediaan sumber daya. Tentu saja, masyarakat dan pemerintah telah sama-sama berusaha secara maksimal dalam menunjang keberhasilan program, namun

hambatan dan juga kendala juga tidak luput dalam pelaksanaannya. Hal tersebut yang menjadikan sumber daya yang tersedia di masyarakat kurang maksimal.

Meskipun, dalam pelaksanaan dengan kualitas sumber daya yang baik terdapat pula hambatan dan juga kegagalan yang dialami saat pelaksanaan program. Tetapi, masih ada harapan dan juga usaha dari pemerintah dan masyarakat untuk terus memperjuangkan usaha mereka agar dapat memberikan hasil yang memuaskan. Segala bentuk solusi dan penawaran yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk usaha dalam mendorong masyarakat untuk tetap semangat dalam mencapai keberhasilan.

### **3. Peran Utama Disposisi atau Sikap Pelaksana Birokrasi dalam Keberhasilan Program Padat Karya**

Sikap dan keputusan yang diambil oleh pelaku birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Pemerintah yang merupakan pemangku kebijakan memegang kuasa penuh terhadap sikap yang harus diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memberikan sikap yang nantinya

menjadi jalan menuju kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak hanya mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas dalam pelaksanaannya, namun Pemerintah sudah seharusnya mempunyai keinginan serta kecenderungan sikap positif dalam melaksanakan kebijakan yang telah disahkan. Sehingga, disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan berlangsung efektif. Disahkannya Program Padat Karya oleh Walikota Kota Surabaya dapat dikatakan merupakan sikap positif dari pelaksana untuk menanggulangi adanya kenaikan angka kemiskinan dan juga pengangguran. Selama pelaksanaannya, tidak hanya memerlukan ketersediaan sumber daya, tetapi juga diperlukan adanya dukungan dan motivasi terhadap masyarakat yang terserap dalam program padat karya, agar mampu terus berusaha dan bekerja keras.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan program padat karya dapat dikatakan berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit kekurangan dan kendala. Tentu saja disposisi memiliki peran utama dalam

mendorong keberhasilan program padat karya. Dalam hal ini, pemerintah selaku pelaksana birokrasi telah berusaha dengan baik untuk memperlihatkan peran mereka dalam pelaksanaan program.

Dengan memberikan dukungan dan motivasi, memastikan birokrasi memiliki kapasitas yang memadai, dan juga strategi untuk memperkuat ASN dalam menghadapi tantangan menjadikan bentuk usaha pemerintah untuk memastikan bahwa disposisi memiliki peran yang sangat penting dalam keberjalanan program. Masyarakat selaku penerima manfaat program, juga merasakan peran pemerintah dalam pelaksanaan program padat karya. Dengan tetap berusaha memberikan respon dan tanggapan yang baik terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

#### **4. Peran Struktur Birokrasi dalam Keberhasilan Pelaksanaan Program Padat Karya**

Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai sebuah kerangka dari organisasi yang didalamnya mengatur mengenai hierarki, tugas, dan juga prosedur didalam sebuah entitas pemerintahan atau organisasi. Dalam hal implementasi kebijakan struktur memiliki peran yang sangat penting,

dikarenakan menjadi kerangka dalam organisasi yang nantinya mengatur program yang telah disahkan oleh pemerintah. Sehingga, perlukan struktur birokrasi yang sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dengan adanya efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan program padat karya, seperti yang telah tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2023 tentang Padat Karya dibentuk adanya tim Padat Karya yang dipilih langsung oleh Walikota Kota Surabaya berdasarkan dengan tupoksi dan fungsinya masing-masing.

Tim Padat Karya yang telah dibentuk oleh pemerintah mengantongi tugas dan kewajiban yang cukup penting dalam pelaksanaan program. Tim Padat Karya dinilai telah melaksanakan perannya dalam pelaksanaan program padat karya untuk keberhasilan program. Untuk mendapatkan keberhasilan tentu harus memiliki kecepatan dan juga ketanggapan anggota tim dalam merespon dan menangani kebutuhan dan juga masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan program. Maka, dari itu pemerintah membentuk secara langsung anggota dari tim padat karya tersebut sesuai dengan tupoksi dan fungsi dari masing-

masing instansi yang terkait. Dapat dimaknai bahwa, dalam pembentukannya pemerintah sangat berhati-hati dan sangat memperhatikan isi anggota dari Tim Padat Karya.

Struktur birokrasi yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya melalui adanya tim padat karya menjadi salah satu bentuk pemerintah memperlihatkan peran struktur birokrasi merupakan indikator yang sangat penting dalam implementasi program padat karya. Seperti dengan anggota tim dipilih berdasarkan dengan fungsi dan tugasnya, memastikan koordinasi yang terjalin antara anggota berjalan dengan baik, serta membuat prosedur dengan SOP yang berguna untuk mendukung keberhasilan program. Di sisi masyarakat pemerintah berusaha untuk merespon dan menanggapi kebutuhan dan hambatan yang dialami masyarakat selama pelaksanaan program, memastikan arahan dan pembinaan untuk masyarakat berjalan dengan lancar, serta memberikan panduan dan bantuan yang memadai. Sehingga, dalam hal ini pemerintah telah mewujudkan peran struktur birokrasi yang baik dalam keberhasilan program padat karya khususnya kecamatan Wonocolo.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka memperoleh kesimpulan bahwa, keempat faktor tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dalam implementasi program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo. Dimana pemerintah telah mampu menyediakan dan memberikan keempat faktor tersebut kepada masyarakat.

Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Dispositions*) atau Sikap Pelaksana Birokrasi, serta adanya Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) dapat diposisikan sebagai faktor kepemilikan atau hal yang harus dimiliki oleh birokrasi dalam pelaksanaan program telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah, seperti dengan menyediakan sumber daya baik itu dalam bentuk fasilitas, lahan dan juga lokasi telah tersedia dan diberikan dengan baik kepada masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program. Disposisi atau sikap pelaksana birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk dukungan secara penuh serta motivasi yang diberikan kepada masyarakat telah tersalurkan dengan baik. Serta struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*) dengan dibentuknya Tim Padat Karya telah menjadi jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat dalam pelaksanaan program. Tim Padat Karya

yang dibentuk oleh pemerintah telah menjalankan tugasnya dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan baik.

Sedangkan untuk komunikasi (*Communication*) diposisikan sebagai salah satu aktivitas yang harus dilakukan kepada masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan program telah terlaksana dengan baik. Dimulai dengan sosialisasi, jaringan komunikasi, ketersediaan materi komunikasi, serta pelatihan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan atau implementasi program Rumah Padat Karya.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Rumah Padat Karya Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Meskipun belum berada di titik maksimal, dikarenakan adanya kendala dan juga penghambat dari keberjalanan program. Hal tersebut ditandai dengan, masih adanya masyarakat yang merasa bahwa program ini belum memberikan hasil yang cukup signifikan dihidupnya terlebih dalam bidang ekonomi. Kurang antusiasnya masyarakat terhadap adanya program menjadi penghambat atau kendala berjalannya program.

## SARAN

1. Pada implementasi Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya terdapat kekurangan yang menjadikan hal tersebut faktor penghambat program yakni antusias masyarakat. Sehingga, diperlukan lagi adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat baik itu masyarakat yang telah mengikuti program ataupun masyarakat umum yang menjadi pengguna jasa. Hal tersebut sangat diperlukan untuk kelancaran program dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang telah terserap dalam program.
2. Disediaknya penyuluhan terkait dengan mental masyarakat miskin yang mengikuti Program Rumah Padat Karya. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat banyaknya masyarakat yang tidak sabar dalam menjalani program dan usaha, yang menjadikan mereka berhenti ditengah jalan. Dengan adanya penyuluhan tersebut, diharapkan dapat membuka mata masyarakat terkait dengan pentingnya bekerja keras dalam usaha yang telah diberikan oleh pemerintah untuk memperbaiki hidupnya.

3. Mengingat Program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya merupakan program baru, alangkah baiknya jika selalu memperbarui data terkait dengan perkembangan program di internet. Sehingga, masyarakat dapat mengakses dan mengetahui terkait dengan perkembangan program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). ISLAM DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2). <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>
- Badan Pusat Statistika Kota Surabaya, (2021, Februari 15). *Series Kemiskinan* . Retrieved Oktober 20, 2022, from Badan Pusat Statistika Kota Surabaya: <https://surabayakota.bps.go.id/indicator/23/221/1/series-kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistika Kota Surabaya, (2021, January 15). *Tingkat Pengangguran Terbuka 2018-2020*. Retrieved Oktober 20, 2022, from Badan Pusat Statistika Kota Surabaya: <https://surabayakota.bps.go.id/indic>

- <ator/6/86/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022a). Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Agustus 2022. *Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Agustus 2022, No. 16/12/3578/Th. V. Berita Resmi Statistik*.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022b). Kota Surabaya dalam Angka 2022. *Kota Surabaya Dalam Angka 2022*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Proyeksi Penduduk Kota Surabaya 2023-2032*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya 2022*.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. UGM PRESS.
- Dwiyanto, B. S., & Jemadi. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan. *Jurnal Maksipreneur, III*, 39–40.
- Ginanjar, D. (2022, August 27). *Pandemi Pemicu Jumlah MBR Surabaya Naik, Saat Ini 900 Ribu Orang*. Retrieved Oktober 20, 2022, from JawaPos.com: <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/surabaya/27/08/2022/pandemi-pemicu-jumlah-mbr-surabaya-naik-saat-ini-900-ribu-orang/%3famp>
- Hajar Risa, B. M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *PERSPEKTIF*, 10(2).
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makassar: GARIS KHATULISTIWA.
- H Tachjan, Mariana, D., Paskarina, C., Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Aipi) (Bandung, & Pengembangan, D. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI Bandung.
- I Nyoman Sumaryadi. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat*. Penerbit Citra Utama.
- Ismansyah, P. A. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. *Demokrasi*, 43.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*,

- Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo. (Original work published 2015)
- Kota Surabaya, P. (2022, February 15). *Harapan Besar Rumah Padat Karya: Warga Surabaya bahagia dan Memiliki Pendapatan*. Retrieved Oktober 20, 2022, from Pemerintah Kota Surabaya: <https://www.surabaya.go.id/id/berita/68069/harapan-besar-rumah-padat-karya-warga-surabaya-bahagia-dan-memiliki-pendapatan>
- Kutha Ratna, N. (2010). *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya*. Pustaka Pelajar.
- Liputan6.com. (2022, July 12). *Baru Diresmikan, Rumah Padat Karya Viaduk Surabaya Berhasil Raup Omzet Puluhan Juta*. Retrieved Oktober 20, 2022, from Liputan6: <https://m.liputan6.com/jatim/read/5011753/baru-diresmikan-rumah-padat-karya-viaduk-surabaya-berhasil-raup-omzet-puluhan-juta>
- Media, K. C. (2022, June 29). *Rumah Padat Karya Surabaya Serap Ratusan Tenaga Kerja dari Keluarga MBR*. KOMPAS.com. Retrieved Oktober 20, 2022, from Kompas.com: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/biz/read/2022/06/29/185221628/rumah-padat-karya-surabaya-serap-ratusan-tenaga-kerja-dari-keluarga-mbr>
- Noorca, D. (2022, June 21). *MBR Surabaya Berdaya Lewat Program Padat Karya*. Retrieved Oktober 20, 2022, from suarasurabaya.net: <https://www.surabaya.go.id/id/berita/68069/harapan-besar-rumah-padat-karya-warga-surabaya-bahagia-dan-memiliki-pendapatan>
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjmd) Kota Surabaya Tahun 2021-2026
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 21
- Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 66 Tahun 2022
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya
- Rahayu, T. (2007). Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus tentang Pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. *Demokrasi*, 6(1).
- Rai, G., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan



- Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71–82.
- Rohman , A., Hanafi , Y. S., & Tri Hardianto, W. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 154.  
<https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.14>
- 69
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. PT. Refika Aditama.
- Sri Pawening, A., & Lestari, P. (2020). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(5).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo.
- Tiara Rama Dian, M. F. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). *Publika*, 7 (4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Penanganan Fakir. Miskin.